

**PROFIL PEJABAT STRUKTURAL**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Nama : Dra. Monika Nur Lastiyani, MM  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Katholik  
 Instansi : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY  
 Unit : -  
 Jabatan : Kepala Dinas  
 Pendidikan : S-2 Magister Manajemen  
 Pangkat/Golongan/Ruang : Pembina Utama Madya/ IV / d

**A. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL**

NO	Jabatan	TMT Jabatan	Nomor SK	Eselon	Instansi
1	Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi	2007-04-09	155/Pem.D/UP/D.4	4A	Kantor Arsip Daerah
2	Kepala Seksi Data dan Teknologi Informasi	2007-04-09	363/Pem.D/UP/D.4	4A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
3	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	2012-10-30	400/Pem.D/UP/D.4	3A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
4	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian Bahan Pustaka	2014-12-24	302.2/Pem.D/UP/D.4	3A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
5	Kepala Balai Layanan Perpustakaan	2015-12-23	445/Pem.D/UP/D.4	3A	Balai Layanan Perpustakaan
6	Kepala Bidang Pelayanan dan Pelestarian	2016-01-26	012/Pem.D/UP/D.4	3A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
7	Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	2018-01-12	009/Pem.D/UP/D.4	2A	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
8	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2019-01-03	369/Pem.D/UP/D.4	2A	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

NO	SEKOLAH/UNIVERSITAS	JURUSAN	TAHUN LULUS	STTB
1	SD NEGERI Lempuyangwangi II	SEKOLAH DASAR	1975	XII Aa 04535
2	SMP Pangudi Luhur I Yogyakarta	SMP	1979	XII Bb 388175
3	SMEA Negeri 2 Yogyakarta	SMA Tata Usaha	1982	13 OC os 0071619
4	IKIP Sanata Dharma Yogyakarta	S-1 Akuntansi	1987	2899/SD/FP/IPS/S1/87
5	Univeristas Sarhaa Wuyata Tamansiswa	S-1 Magister Manajemen	2009	010171/Ps



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA  
**UNIT KERJA** : DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MONIKA NUR LASTIYANI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **106712**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

**Rp. 1.590.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 118 m<sup>2</sup>/48 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 188 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 621 m<sup>2</sup>/621 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 710.000.000
5. Tanah Seluas 142 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
6. Tanah Seluas 267 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

**Rp. 153.350.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 10.900.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000
3. MOTOR, HONDA GL Tahun 1980, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000
5. MOBIL, TOYOTA CAMRY Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOTOR, YAMAHA B66 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



25.750.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	642.350.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	140.475.190
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>Sub Total</b>	Rp.	2.526.175.190
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	750.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	1.776.175.190

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.